



## Pengaruh Pengorganisasian Pucuk Pimpinan Gereja Terhadap Episkopal Sinodal Gereja HKI

**Hendriko Siagian<sup>a, 1\*</sup>, Pardomuan Munthe<sup>b, 2</sup>**

<sup>ab</sup> Sekolah Tinggi Teologia Abdi Sabda, Medan, Indonesia

<sup>1</sup> hendrikosiagian@gmail.com\*

\*korespondensi penulis

---

**Informasi artikel**

*Received: 20 Januari 2021;*  
*Revised: 15 Februari 2021;*  
*Accepted: 28 Februari 2021.*

**Kata-kata kunci:**

Pengaruh Pengorganisasian;  
 Pucuk Pimpinan;  
 Episkopal Sinodal;  
 Gereja HKI.

---

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kepemimpinan jabatan pucuk pimpinan Gereja dalam paradigma episkopal sinodal dalam Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif melalui survei, penyebaran angket. Hasil penelitian ini, pertama, pemahaman tentang kepemimpinan Jabatan Pucuk Pimpinan Gereja dalam paradigma Episkopal Sinodal dikategorikan “Sangat Baik” sesuai dengan angket yang telah disebar. Hal ini dapat mengindikasikan kalau pemahaman HKI akan keberadaan Pucuk Pimpinan adalah dalam pengertian hierarki kepemimpinan dalam gereja. Kedua, pengaruh pengorganisasian kepemimpinan pucuk pimpinan gereja terhadap Gereja HKI dikategorikan “Kurang Baik”. Artinya, kurangnya pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pucuk pimpinan Gereja yang mewarisi pelayanan seorang episkopos akan tugas penggembalaan pelayan lainnya dan warga jemaat dalam kebenaran ajaran dan disiplin gereja sesuai dengan keberadaannya sebagai Penilik Jemaat. Dalam konteks Alkitab, jabatan episkopos sebagai pemimpin di tengah-tengah jemaat bukanlah menciptakan hierarki dalam kepemimpinan Kristen, melainkan berperan sebagai gembala yang mengayomi, menjaga, dan membentengi jemaat dari kesesatan.

---

**Keywords:**

*Organizing Effect;*  
*Top Leadership;*  
*Sinodal Episcopal;*  
*HKI Church.*

---

**ABSTRACT**

*The Organizing Effect of Church Leadership on Episcopal Sinodal HKI. The research aim is to find out the leadership position of the top leadership of the Church in the paradigm of the sinodal episcopal in the Indonesian Christian Huria Church (HKI). This research uses quantitative research method through survey, and questionnaire. The results of this study, first, the understanding of the leadership of the Top Leadership of the Church in the paradigm of Episcopal Sinodal categorized as "Excellent" in accordance with the polls that have been disseminated. This may indicate that the HKI understanding of the existence of the Leadership Council is in the sense of leadership hierarchy in the church. Second, the influence of organizing the leadership of the top church leadership on the HKI Church is categorized as "Less Good". That is, the lack of implementation of the duties and responsibilities of the top leadership of the Church that inherits the ministry of an episcopos of the grazing duties of other ministers and citizens of the congregation in the truth of church doctrine and discipline in accordance with its existence as a Church Reviewer. In the biblical context, the episcopos position as a leader in the midst of the church does not create a hierarchy in Christian leadership, but rather acts as a shepherd who protects, safeguards, and fortifies the church from error.*

---

**Copyright © 2021 (Hendriko Siagian & Pardomuan Munthe). All Right Reserved**

How to Cite : Siagian, H., & Munthe, P. (2021). Tinjauan Teologis Dogmatis Tentang Jabatan Pucuk Pimpinan Gereja Secara Episkopal Sinodal Dalam Pemahaman Pendeta HKI . *In Theos : Jurnal Pendidikan Dan Teologi*, 1(2), 65–73. Retrieved from <https://journal.actual-insight.com/index.php/intheos/article/view/201>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

## Pendahuluan

Dunia masa kini ditandai oleh kelangkaan pemimpin berkualitas, sementara kita dihadapkan pada problem-problem yang berat. Banyak orang yang telah memperingatkan kita akan kehancuran yang bakal menimpa dunia; tapi hanya sedikit orang yang menawarkan cara-cara penangkalannya. Keterampilan dan pengetahuan teknik kita berlebih-lebihan, tapi yang kurang adalah hikmat dan kearifan. Dengan meminjam metafora Tuhan Yesus, kita ini bagaikan “kawanan domba tanpa gembala”, sementara para pemimpin kita sering tampil seperti “si buta yang memimpin orang muda.” (Stott, 2012). Masalah “pemimpin” dan “kepemimpinan” adalah sangat penting dalam kehidupan manusia. Tidak ada masyarakat yang tidak mempunyai pemimpin, bagaimanapun sederhananya tetap membutuhkan pemimpin untuk mengatur serta memberi petunjuk dalam kehidupan masyarakat tersebut.

Sepanjang sejarah, manusia selalu menginginkan agar memiliki pemimpin yang bertanggung jawab, yang dapat membawa masyarakat yang dipimpinnya kepada kehidupan yang sejahtera. Ditinjau dari sudut teologi, pemimpin adalah merupakan hal yang pokok, yang bertugas untuk membimbing serta mengatasi pergumulan-pergumulan yang dihadapi manusia setiap saat dalam kehidupannya. Seorang pemimpin harus terlibat langsung dengan orang yang dipimpinnya, karena dengan demikian pemimpin dapat mengetahui secara lebih dekat bagaimana situasi dari kelompok yang dipimpinnya. Melalui keterlibatan seorang pemimpin terhadap anggotanya, maka dia dapat memberikan penilaian tentang maju mundurnya keadaan yang dipimpinnya (Simarmata, 1996). Munthe dalam bukunya mengutip perkataan George Carey, seorang Uskup Agung Gereja Anglikan Canterbury, yang berkata, “Gereja mati bila para pemimpin mati. Gereja mati mulai dari atas ke bawah. Tunjukkan padaku sebuah gereja yang sedang berkembang, maka saudara akan memperlihatkan kepadaku pemimpin yang mempunyai visi. Pemimpinlah yang membuat pertumbuhan itu. Di mana kita mempunyai pemimpin yang rohaniah, yang berdoa. Di situlah kita mempunyai pertumbuhan yang baik” (Munthe, 2004).

Dalam sebuah lembaga duniawi, keputusan-keputusan diambil oleh pegawai atau petugas yang bertanggung jawab. Namun dalam gereja hal ini berbeda, karena gereja adalah milik Tuhan. Dialah yang menentukan bagaimana gereja-Nya diperintah. Karena Kristus adalah Kepala Gereja, maka gereja harus menaklukkan diri kepada-Nya, juga dalam hal pemerintahan gerejawi. Untuk memelihara dan memerintah gereja-Nya, Kristus menunjuk orang-orang tertentu untuk memimpin gereja dalam nama-Nya. Supaya orang-orang ini mampu melaksanakan tugas yang indah ini, maka Kristus memberi mereka karunia-karunia khusus. Pekerjaan mereka bersifat pelayanan. Pejabat-pejabat ini Tuhan berikan kepada jemaat-Nya (Boersema, 2015).

Salah satu unsur penting dalam keberhasilan pelayanan gereja adalah membangun sinergi, relasi dan kerja sama sesama pelayan gerejawi (Jacobs, 1988). Ini merupakan suatu keharusan karena sejak gereja mula-mula telah ada pelayan yang diangkat untuk melayani di jemaat, yaitu: rasul (apostel), diakonos, penilik jemaat (episkopos), guru, penatua, dan lain-lain. Semua pelayan gerejawi ini bekerja dan berkarya untuk melaksanakan misi agung gereja. Pelayanan yang menerima panggilan ini bekerja menurut karunia-karunia yang diperoleh. Sekalipun berbeda-beda karunia yang diperoleh oleh pengerja gereja, relasional semua pelayan ini diikat dalam suatu istilah yaitu kawan sekerja Allah. Para pelayan yaitu rasul, penatua, penilik jemaat, diaken dan pelayan lainnya bekerja dan berkarya sesuai dengan karunia (talenta) masing-masing sebagai kawan sekerja Allah.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pimpinan adalah oknum dipercayakan untuk memimpin atau mengorganisir suatu lembaga atau organisasi, yang dalam hal ini adalah gereja. Jika berbicara tentang model kepemimpinan, paling tidak banyak hal yang harus di kaji: kultur, pemahaman, sistem, dan historitas tekstual, maupun konteks. Secara empiris, ada kecenderungan bahwa gereja yang menjadikan sistem pemerintahan gereja Episkopal akan bertemu dengan persoalan kepemimpinan. Hal ini sangat terkait dengan kekuasaan yang dimiliki oleh seorang bishop, ephorus (episkopos). Tidak dapat dipungkiri bahwa ketegangan-ketegangan yang akhirnya mengkristal adalah mengikuti model kepemimpinan yang diwariskan oleh para reformator (Martin Luther dan John Wesley sampai abad ke-18. Kekuasaan berada pada bishop atau ephorus dengan aturan main: (1) Bishop bertanggung jawab terhadap penempatan pendeta; (2) Bishop memiliki hak kekuasaan veto dalam penahbisan; (3) Bishop adalah pejabat yang secara hukum adalah pejabat tertinggi.

Sistem pemerintahan Episkopal akan sangat rentan terhadap ketegangan dan konflik sebagai akibat dari puncak hierarki yang selalu diinterpretasikan oleh bishop atau ephorus. Ketegangan tersebut akan muncul ketika dalam operasionalisasi hak dan wewenang seperti yang penulis sebutkan di atas.

Hal tersebut paling tidak sudah memberikan indikasi adanya peluang untuk menjadikan jabatan bishop atau ephorus sebagai kekuatan yang ditakuti (Lumbantobing, 2003). Sistem pemerintahan Episkopal itu sendiri adalah pemerintahan gereja yang dipimpin oleh para uskup atau penilik jemaat (Thiessen, 1993). Nama Episkopal berasal dari Bahasa Yunani yaitu *ἐπίσκοπος* (episkopos) yang berarti *overseer* atau penilik (kata ini juga diterjemahkan menjadi Bishop dan Uskup) dan menyatakan bahwa gereja diatur dan dipimpin oleh para Bishop.

Dalam struktur, episkopal berbentuk hierarkis di mana “episkopos” mendapat kedudukan yang tertinggi. Karena itu tidak heran, bahwa jabatan “episkopos” menjadi satu-satunya pemimpin. Gereja berbentuk episkopal ini tersusun secara berderajat atau hierarki yang bertanggung dari kedudukan di pucuk pimpinan terus turun sampai paling bawah, yaitu kaum awam atau anggota biasa yang tidak berwenang apa-apa. Pucuk pimpinan menetapkan dogma dan peraturan yang berlaku di tiap gereja lokal (Meliala & Tarigan, 2016). Episkopal merujuk pada suatu bentuk tata kelola Gereja yang bersifat hierarkis, di mana pemimpin otoritas setempatnya disebut uskup. Struktur tersebut digunakan oleh banyak Gereja dan denominasi Kristen utama seperti Gereja Timur (misalnya Ortodoks Timur), Anglikan, Lutheran, serta beberapa lainnya yang didirikan secara terpisah dari garis ini (Ismail, 2009).

Jika berbicara tentang karakter pemimpin, kita akan sadar bahwa hal ini belum mendapat perhatian. Sebab kebijakan yang dibuat sangat ditentukan oleh karakter dan model kepemimpinannya. Padahal, kualitas kepemimpinan seseorang sangat ditentukan oleh karakternya. Tidak heran berbagai persoalan kemudian timbul sehubungan dengan model kepemimpinan, kebijakan yang dihasilkan, maupun kebuntuan karena kepemimpinan tanpa visi apa pun kecuali melakukan rutinitas. Masalah menjadi lebih rumit jika yang lebih dilihat adalah soal jabatan dan kekuasaan, bukan kepemimpinan. Karena itu bukan hal yang aneh jika kemudian cara-cara politis masuk ke dalam gereja. Bukan hal yang aneh pula jika ada konflik kepentingan yang berujung dengan tuntutan-menuntut di pengadilan. Masalah juga semakin lebar dengan tradisi bagi-bagi “kue kekuasaan”, baik itu jabatan di bawahnya maupun penempatan di “jemaat yang basah” untuk mereka yang sudah mendukung, dan “penyingkiran” untuk yang tidak mendukung (Salim, 2009).

Seputar hal ini, masalah lain yang terlihat adalah “Superioritas dan Inferioritas”. Munculnya superioritas *partohonan* biasanya didasarkan pada jabatan. Superioritas itu merupakan sikap pemimpin yang merasa dirinya lebih penting daripada yang lain. Dia merasa sebagai atasan, sehingga berhak untuk menekan bawahan dengan pendekatan struktural, sehingga tercipta hubungan yang disharmoni. Hubungan yang disharmoni ini juga dapat terjadi di tingkat pucuk pimpinan (pusat), yakni antara Ephorus dan Sekjen. Disharmoni ini telah berdampak besar pada tubuh gereja terlebih secara organisatoris, bahkan telah pernah memicu persoalan yang berkepanjangan hingga menyebabkan krisis di dalam tubuh gereja dan warga jemaat. (Simanjuntak, 2014). Otoritas dan kekuasaan pucuk pimpinan Gereja cenderung menggiring kepemimpinan gereja ke arah yang otoriter dan penyalahgunaan kekuasaan. Realita yang terjadi adalah dengan kekuasaannya sebagai pemimpin tertinggi dalam struktur gerejawi, maka pucuk pimpinan memiliki kapasitas untuk melakukan pemutasian atau penempatan pendeta, pengangkatan pendeta untuk menerima tahbisan, dan keputusan serta kebijakan lain yang kesannya semena-mena. Bahkan ungkapan yang mengatakan: “Saya adalah pimpinan, di ujung pena inilah masa depanmu” sudah tidak asing lagi dalam lingkungan kepemimpinan gereja (Saragih, 1999).

Max Weber menegaskan, ketika seseorang atau sekelompok orang memiliki kekuasaan yang sangat besar terhadap orang lain, maka pada saat itu telah terjadi dominasi. Pada saat yang sama, seseorang yang memiliki, seseorang yang memiliki otoritas yang besar (superior) akan mendominasi orang lain yang memiliki otoritas lebih rendah (inferior). Hal yang menarik, Weber mencermati bahwa setiap kasus dominasi selalu memiliki tujuan-tujuan ekonomis, meskipun jumlahnya relatif. Kepentingan tertentu, seringkali merupakan dasar dan tujuan dalam membangun solidaritas antara pimpinan dan bawahan (Weber, 1978). Situasi ini membuat gereja saat ini sangat membutuhkan seorang pemimpin yang mempunyai integritas. Pemimpin yang mempunyai integritas adalah pemimpin yang mempunyai karakter yang baik, melakukan apa yang ia katakan betapa pun sulitnya, hidup sesuai dengan yang diajarkannya sekali pun ada banyak tantangan serta harus jujur dan transparansi terhadap semua orang betapa pun besar resikonya (Tarigan, 2014).

Masalah seputar pucuk pimpinan Gereja telah menjadi pembahasan sejak masa zending RMG di Tanah Batak, yakni dalam pembentukan Tata Gereja tahun 1881 sebagai upaya mempersatukan jemaat-jemaat batak secara organisatoris. Dalam Tata Gereja ini, struktur gereja adalah bagian dari struktur RMG sebagai badan zending yang mengirim missionaris ke Tanah Batak. Artinya badan

zending di Tanah Batak adalah bagian dari wilayah pelayanan dan bagian dari struktur RMG. Dengan demikian, gereja zending di Tanah Batak tidak memiliki struktur gereja tersendiri. Dengan kata lain, Tata Gereja tahun 1881 merupakan satu upaya untuk menegaskan struktur pelayanan RMG yang berpusat di Jerman hingga tingkat jemaat di Tanah Batak. Tata Gereja ini menjelaskan bahwa Ephorus di Tanah Batak adalah perpanjangan tangan langsung dari RMG yang berdomisili di Jerman, dimana RMG memiliki garis komando kepada Ephorus dan Ephorus sendiri harus membuat laporan kepada RMG.

Secara teologis, jabatan Ephorus dipahami sebagai penilik jemaat, karena pelayanan yang dilakukan adalah dalam rangka pengawasan terhadap pertumbuhan dan perkembangan yang berkaitan dengan jemaat secara keseluruhan. Ephorus dalam tugas kepenilikannya merupakan bagian dari tugas episkopos. Namun dalam hal ini Ephorus memiliki kekuasaan yang sangat besar terutama berhadapan dengan jemaat Kristen Batak. Majelis Pusat diketuai oleh Ephorus, dan ia juga yang berhak mengundang jika akan diadakan rapat. Hal ini menegaskan wewenang Ephorus sangat besar sebagai pemimpin tertinggi dalam gereja Batak. Hal ini sangat terkait dengan diberlakukannya sistem episkopal dalam gereja Batak, yang memberi wewenang yang sangat besar kepada Ephorus. Pemberian wewenang tersebut juga sekaligus menempatkan anggota jemaat tidak memiliki otoritas. Dengan kata lain, unsur Ephorus sebagai jabatan tertinggi dalam gereja sudah muncul (Siagian, 2014). Namun Gereja Batak yang lahir dari penginjilan RMG dan sedikit banyaknya mengadopsi pola dan sistem struktur dan kepemimpinan RMG dan gereja Jerman belum lepas dari pengaruh penjelasan di atas. Dengan istilah Ephorus untuk menunjuk pada Pucuk Pimpinannya sebenarnya mengindikasikan bahwa Gereja Batak belum lepas dan mandiri secara struktur dan sistem kepemimpinannya.

Ada fenomena umum yang terjadi dalam diri pelayan gereja yang cenderung memahami tabhisan sebagai *privillage*, terutama ketika ia menduduki jabatan struktural. Pada tataran tertentu, hal itu mengabaikan tugas dan peran pendeta sebagai “gembala”. Ephorus sebagai Pucuk Pimpinan Gereja didorong untuk memegang dua jabatan kepemimpinan sekaligus, sebagai pemimpin spiritual dan pemimpin organisasi. Fungsi Ephorus sebagai Penilik Jemaat, maka secara teologis Ephorus sebagai pemimpin tertinggi ditempatkan dan berfungsi sebagai Bishop. Menempatkan Ephorus sebagai imam dengan kekuasaan yang luar biasa besarnya, dan dengan dua jabatan sekaligus yakni sebagai pemimpin spiritual dan pemimpin organisasi, sesungguhnya kondisi ini sangat rentan terhadap berbagai polemik.

Kepemimpinan di Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) mengadopsi sistem pemerintahan gereja Episkopal Sinodal. Kepemimpinan di HKI dipangku oleh pucuk pimpinan yang terdiri dari dua jabatan penting, yakni Ephorus dan Sekretaris Jenderal yang dipilih dan diangkat melalui sebuah wadah bernama Sinode. Keduanya dapat menduduki kursi kepemimpinan di HKI melalui sebuah sistem pemilihan, yang disebut dengan *Manjomput Na Sinurat*. Namun masalah kepemimpinan telah menjadi pembahasan yang panjang dalam aras sejarah HKI dimana jabatan, kekuasaan, dualisme kepemimpinan, istilah penyebutan, bahkan dalam pelaksanaan tugas tanggung jawab pelayanan jabatan pucuk pimpinan menyita perhatian dan mengundang perdebatan. Sebagai gereja Lutheran yang Episkopal Sinodal, HKI dalam pelaksanaan tugas kepemimpinannya menempatkan Sinode sebagai keputusan dan kuasa tertinggi yang akan diberlakukan di tengah-tengah gereja. Namun dalam pemahaman dan pelaksanaan tanggung jawab pelayanan Jabatan Pucuk Pimpinannya, HKI memiliki otoritas dan kekuasaan untuk mengambil suatu keputusan ataupun sikap di tengah-tengah gereja. Hal ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) HKI BAB XIV Tentang Peraturan Tambahan Pasal 47, butir a: “Hal-hal yang belum di atur dalam Peraturan Rumah Tangga ini kemudian akan di atur oleh Pucuk Pimpinan dan Majelis Pusat dan tidak boleh bertentangan dengan Tata Gereja (Tata Dasar, Peraturan Rumah Tangga, Hukum Siasat Gereja) dan Pengakuan Iman Percaya HKI.” (Siagian, 2014). Hal ini mengindikasikan kalau praktik kekuasaan oleh karena jabatan sangat dekat dengan konteks kehidupan bergereja, dimana jabatan pucuk pimpinan memiliki otoritas kekuasaan untuk mengambil keputusan maupun kebijakan.

## Metode

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif yang dilakukan melalui survei, penyebaran angket, serta pengumpulan data melalui buku-buku yang relevan dengan obyek yang diteliti. Hal yang diharapkan dengan metode ini yaitu hasil penelitian menjadi lebih akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara kuesioner (angket). Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu ibadah yang sejati, dan variabel terikatnya adalah



pertumbuhan iman. Rancangan dan prosedur penelitian terdiri dari penetapan populasi dan sampel, penetapan instrumen dan uji instrumen. Teknis analisa diproses dengan mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami.

### Hasil dan Pembahasan

Hasil temuan data dipaparkan dengan beberapa tabel di bawah ini.

Kategori Penilaian Tabel I				
No Item	Pertanyaan Tentang kepemimpinan Jabatan Pucuk Pimpinan Gereja dalam paradigma Episkopal Sinodal	Jlh. Nilai/ Responden	Nilai Rata Rata	Kategori Penilaian
1	Pentingnya sistem pemerintahan dalam gereja adalah upaya menata gereja secara baik dan benar dalam hal kepemimpinan, demi pelayanan dan pengembangan gereja secara rohani serta membangun lembaga gerejawi yang teologis – alkitabiah.	79/22	3,59	Sangat Baik
2	Gereja harus ditata sesuai dengan satu sistem pemerintahan yang dipahami dan dianut. Gereja tidak dapat mencampur-aduk bermacam-macam sistem pemerintahan untuk diterapkan, sebab identitas gereja tercermin lewat bagaimana gereja tersebut ditata lewat sistem pemerintahan yang dianutnya.	72/22	3,27	Sangat Baik
3	Munculnya jabatan <i>episkopos</i> dalam perkembangan jemaat mula-mula adalah didorong oleh kebutuhan jemaat akan sosok seorang pemimpin yang akan membentengi jemaat dari ajaran dan pemimpin palsu serta menjaga keutuhan jemaat dari ancaman perpecahan, dimana sebelumnya jemaat Kristen masih dipimpin oleh sidang para penatua.	67/22	3,04	Baik
4	Gereja dengan sistem Episkopal Sinodal adalah Gereja yang dipimpin oleh seorang pemimpin ( <i>episkopos</i> /penilik/bishop/uskup) yang mengatur dan menata keberlangsungan kehidupan gereja-gereja lokal; serta memimpin setiap pelayan gereja dan warga jemaatnya secara holistik sesuai dengan tuntunan tugas dan tanggung jawab jabatan pelayanannya.	76/22	3,45	Sangat Baik
5	Sinode ( <i>sunhodos</i> ) adalah sidang/konsili pertemuan antara pelayan gereja sebagai wadah tertinggi untuk membicarakan dan memutuskan yang terkait dengan segala kehidupan aspek gereja. Maka dalam kaitan pemerintahan Episkopal Sinodal ini, Pucuk Pimpinan Gereja adalah perpanjangan tangan Sinode untuk melaksanakan dan mengemban keputusan Sinode yang akan dilaksanakan dan dipatuhi di dalam gereja secara holistik.	78/22	3,54	Sangat Baik
6	Episkopal Sinodal merujuk pada suatu bentuk tata kelola <a href="#">Gereja</a> yang bersifat <a href="#">hierarkis jabatan kepemimpinan</a> di mana <i>episkopos</i> mendapat	68/22	3,09	Baik

	kedudukan yang tertinggi dan menjadi satu-satunya pemimpin.			
7	Sistem pemerintahan gereja secara Episkopal Sinodal menjadi bagian dari reformasi Martin Luther sebagai pembaharuan terhadap kekuasaan dan otoritas Paus dalam sistem pemerintahan Papal yang dipahami dan diterapkan oleh Gereja Katholik Roma; dimana Luther memakai <i>Episkopos</i> (dalam bentuk tunggal) dan membatasi otoritas pemimpin dengan diadakannya Sinode.	66/22	3	Baik
8	Pada gereja masa kini, <i>ἐπισκόπος</i> ( <i>episkopos</i> ) yang berarti “ <i>overseer/</i> penilik” atau dapat diartikan menjadi Bishop atau Uskup dapat diterjemahkan menjadi Pucuk Pimpinan Gereja (Bishop/Ephorus), dimana ia menjadi pemimpin tertinggi dan yang seharusnya menjadi pemimpin satu-satunya.	71/22	3,22	Baik
9	Sebagai penilik jemaat ( <i>episkopos</i> ), Pucuk Pimpinan Gereja mempunyai tanggung jawab untuk menjaga keutuhan dan kesatuan jemaat, serta menjaga kemurnian ajaran dan pemberitaan firman. Ia juga bertanggung jawab mengajarkan dan menerapkan segala ajaran dan peraturan yang akan diberlakukan di tengah-tengah gereja.	70/22	3,18	Baik
10	Dalam pemahaman dan penerapan sistem pemerintahannya, HKI tidak murni menata dirinya secara Episkopal Sinodal.	75/22	3,4	Sangat Baik

Berdasarkan data di atas, maka nilai rata-rata keseluruhan pemahaman Pendeta HKI Daerah VI Sumatera Timur II Wilayah I Medan tentang kepemimpinan Jabatan Pucuk Pimpinan Gereja dalam paradigma Episkopal Sinodal adalah:  $\frac{32,78}{10} = 3,27$ . Dari jumlah rata-rata yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman Pendeta HKI Daerah VI Sumatera Timur II Wilayah I Medan tentang kepemimpinan Jabatan Pucuk Pimpinan Gereja dalam paradigma Episkopal Sinodal dikategorikan “Sangat Baik” sesuai dengan angket yang telah disebarikan.

Analisa temuan-temuan khusus: pertama, pertanyaan No. 2 dan 10, dimana kategori penilaian Responden adalah “Sangat Baik”. Kedua pertanyaan ini saling berkaitan satu sama lain, dimana pertanyaan no. 2 menanyakan soal gereja yang harus ditata dengan satu sistem pemerintahan yang dianut oleh gereja dan tidak dapat dicampur-aduk; 13 responden memberi jawaban pada opsi A. “Sangat setuju” dan 9 responden memberi jawaban pada opsi B. “Setuju”. Hal ini mengindikasikan bahwa Pendeta HKI Daerah VI Sumatera Timur II Wilayah I Medan memahami dan setuju kalau gereja harus ditata dengan satu sistem pemerintahan saja. Sedang pertanyaan no. 10 menanyakan soal HKI yang tidak murni menganut sistem pemerintahan Episkopal Sinodal; 15 responden memberi jawaban pada opsi A. “Sangat setuju” dan 4 responden memberi jawaban pada opsi B. “Setuju”. Hal ini mengindikasikan pemahaman Pendeta HKI Daerah VI Sumatera Timur II Wilayah I Medan dimana gereja harus ditata dengan satu sistem pemerintahan saja berbeda dengan penerapan sistem pemerintahan gereja HKI yang tidak murni menganut satu sistem pemerintahan gereja.

Analisa kedua, pertanyaan No. 6, dimana kategori penilaian Responden adalah “Baik”. Hal ini dapat mengindikasikan kalau pemahaman HKI akan keberadaan Pucuk Pimpinan adalah dalam pengertian hierarki kepemimpinan dalam gereja. Semenjak gereja melembaga, maka gereja berdiri dalam struktur kepemimpinan yang bertingkat, dimana pucuk pimpinan menduduki jabatan yang tertinggi. Analisa ketiga, pertanyaan No. 7, dimana kategori penilaian responden adalah “Baik.” Hal ini mengindikasikan kalau Jabatan pemimpin gereja menurut pandangan Luther dalam sistem pemerintahan Episkopal Sinodal menjabat sebagai pemimpin tertinggi dan satu-satunya, namun tugas dan tanggung jawab pelayanannya dirumuskan oleh Sinode; kekuasaan dan otoritas Pucuk Pimpinan juga dibatasi oleh Sinode. Maka, pucuk pimpinan tidak mempunyai kesanggupan untuk melaksanakan tugas maupun keputusan/aturan yang bertentangan dengan keputusan Sinode. Namun HKI sebagai

salah satu gereja Lutheran yang cenderung menganut sistem pemerintahan Episkopal Sinodal menerapkan kepemimpinan “Dwi-Tunggal”, serta masih adanya kemungkinan bagi Pucuk Pimpinan untuk berkuasa dan berotoritas oleh hak prerogatif yang dimilikinya (Sitompul, 1980).

Tabel II. Kategori Penilaian

No Item	Pertanyaan Tentang Pengaruh Pengorganisasian Kepemimpinan Pucuk Pimpinan Gereja Terhadap Lembaga HKI	Jlh. Nilai/ Respon	Nilai Rata Rata	Kategori Penilaian
1	Pucuk Pimpinan Gereja menjadi referentasi kepemimpinan Kristus atas gereja, yakni untuk memimpin dan menggembalakan para pelayan dan seluruh warga jemaat dalam ajaran dan disiplin gereja. Apakah anda sering mendapatkan pembinaan, penggembalaan, arahan dan ajaran dari Pucuk Pimpinan Gereja?	45/22	2,04	Kurang Baik
2	Pucuk Pimpinan Gereja tidak hanya menjadi pemimpin lembaga gerejawi, melainkan juga bertindak sebagai pemimpin spiritual bagi para pelayan dan seluruh warga jemaat. Apakah anda sering mendapatkannya dari Pucuk Pimpinan Gereja?	47/22	2,13	Kurang Baik
3	Pucuk Pimpinan Gereja adalah teladan bagi para pelayan gereja dalam hal melayani dan membangun jemaat, terutama dalam mengajarkan dan menerapkan ajaran serta peraturan yang berlaku di tengah-tengah gereja. Apakah anda sering meniru dan mendapatkan keteladanan itu dari Pucuk Pimpinan Gereja?	42/22	1,9	Kurang Baik
4	Bercermin dari kepemimpinan Yesus, Para Rasul dan <i>episkopos</i> atas gereja yang selalu mengajarkan kebenaran dan meluruskan kesalahan, baik dalam ajaran maupun aturan-aturan. Apakah Pucuk Pimpinan Gereja sering menanamkan pemahaman tentang kebenaran ajaran Kristen dan Konfesi, ataupun segala aturan dan disiplin gereja?	53/22	2,4	Kurang Baik
5	Selain dalam hal pemutasian atau penugasan pelayanan pendeta, apakah anda sering menerima bimbingan, penugasan, atau pembinaan dari Pucuk Pimpinan Gereja?	63/22	2,86	Baik
6	Lembaga gereja terstruktur dalam pola hierarki jabatan pelayanan menempatkan adanya perbedaan tugas dan fungsi dari setiap pelayan (pendeta) sesuai dengan jabatan pelayanannya (Pucuk Pimpinan, Kadep, MP, Praeses, Pendeta Resort, dsb). Apakah anda sering menerima pengajaran tentang tugas dan tanggung jawab pelayanan sesuai dengan posisi yang anda duduki?	60/22	2,72	Baik
7	Dalam hubungan “pimpinan” dengan “yang dipimpin” dalam tugas dan fungsi pelayanan antara Pucuk Pimpinan Gereja dengan para pelayan (pendeta) lainnya yang menempati posisi yang berbeda, apakah anda sering melakukan hubungan koordinasi dengan Pucuk Pimpinan Gereja?	53/22	2,4	Kurang Baik
8	Dalam konsep pemahaman “DwiTunggal” pada Jabatan Pucuk Pimpinan Gereja, dimana Ephorus dan Sekretaris Jenderal menjalankan tugas dan fungsi yang berbeda-beda, yang mana Ephorus adalah pemimpin yang memainkan peran keimaman dan	54/22	2,45	Kurang Baik

	Sekretaris Jenderal sebagai pemimpin administrasi. Apakah anda sering melihat hubungan koordinasi yang baik diantara keduanya dalam upaya pengembangan lembaga dan pelayanan gereja?			
9	Kesetaraan antara Ephorus dan Sekretaris Jenderal sebagai Pucuk Pimpinan Gereja membuat keduanya menduduki posisi yang sama dan akan cenderung menonjolkan diri masing-masing sebagai Pucuk Pimpinan. Apakah hal ini terlihat dari keduanya?	69/22	3,13	Baik
10	Jika anda menjabat posisi pelayanan sebagai Majelis Pusat, Praeses atau Pendeta Resort, apakah anda sering terbentur dengan sistem dan struktur kepemimpinan di HKI dalam memahami dan menjalankan tugas serta tanggung jawab pelayanan anda?	50/22	2,27	Kurang Baik

Berdasarkan data di atas, maka nilai rata-rata keseluruhan pengalaman dan pengamatan Pendeta HKI Daerah VI Sumatera Timur II Wilayah I Medan tentang Pengaruh Pengorganisasian Kepemimpinan Pucuk Pimpinan Gereja Terhadap Lembaga HKI adalah:  $\frac{24,3}{10} = 2,43$ . Dari jumlah rata-rata yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa Pengaruh Pengorganisasian Kepemimpinan Pucuk Pimpinan Gereja Terhadap Lembaga HKI dikategorikan “Kurang Baik” sesuai dengan angket yang telah disebarkan.

Analisa temuan-temuan khusus: pertama, pertanyaan No. 1 dan 4, dimana kategori penilaian Responden adalah “Kurang Baik”. Hal ini mengindikasikan bahwa kurangnya pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pucuk Pimpinan Gereja yang mewarisi pelayanan seorang *episkopos* akan tugas penggembalaan pelayan lainnya dan warga jemaat dalam kebenaran ajaran dan disiplin gereja sesuai dengan keberadaannya sebagai Penilik Jemaat. Tugas pelayanan keimaman seakan dikesampingkan oleh tugas kepemimpinan lembaga yang membuat kurangnya keterlibatan Pucuk Pimpinan untuk menanamkan ajaran dan disiplin gereja terhadap gembalaannya.

Kedua, pertanyaan No. 2, dimana kategori penilaian Responden adalah “Kurang Baik”. Hal ini mengindikasikan bahwa tugas Pucuk Pimpinan sebagai imam bagi pelayan lainnya dan warga jemaat kurang dipahami dan dihidupi, dimana ia sebagai figur spiritual (imam besar) di tengah-tengah gereja seharusnya menggembalakan umat gembalaannya dalam keteladanan dan kerohanian, yang mana itu akan semakin menumbuh-kembangkan semangat panggilan dan pelayanan bagi umat gembalaannya. Ketiga, pertanyaan No. 8, dimana kategori penilaian responden adalah “Kurang Baik”. Hal ini mengindikasikan bahwa pemahaman dan penerapan konsep kepemimpinan “Dwi-Tunggal” ini kurang berjalan dengan baik, yang mana batasan-batasan kapasitas dalam bertindak sering kurang dipahami dengan jelas; dan juga perbedaan tugas tanggung jawab pelayanan di antara kedua Pucuk Pimpinan sebagai upaya pengembangan lembaga gereja sering terjalin dengan kerja sama yang kurang baik (Diester, 2004).

Keempat, pertanyaan No. 9, dimana kategori penilaian responden adalah “Baik”, yang mana responden banyak memberikan jawaban pada opsi A. “Sangat sering”, dan B. “Sering”. Hal ini mengindikasikan bahwa pemahaman dan penerapan kepemimpinan “Dwi-Tunggal” dalam Jabatan pucuk pimpinan Gereja mengakibatkan Ephorus dan Sekretaris Jenderal berlagak dan menonjolkan diri masing-masing sebagai Pucuk Pimpinan. Pemahaman yang seperti ini dapat menimbulkan “dualisme kepemimpinan” yang mana keduanya merasa sama-sama pimpinan tertinggi dan mempunyai wewenang dalam bertindak.

## Simpulan

Berdasarkan temuan dan analisis data, simpulan tentang pengaruh pengorganisasian kepemimpinan pucuk pimpinan Gereja terhadap Episkopal Sinodal Gereja HKI yaitu: pertama, pemahaman Pendeta HKI Daerah VI Sumatera Timur II Wilayah I Medan tentang kepemimpinan Jabatan Pucuk Pimpinan Gereja dalam paradigma Episkopal Sinodal dikategorikan “Sangat Baik” sesuai dengan angket yang telah disebarkan. Kategori penilaian Responden adalah “Baik”. Hal ini dapat mengindikasikan kalau pemahaman HKI akan keberadaan Pucuk Pimpinan adalah dalam pengertian hierarki kepemimpinan dalam gereja. Semenjak gereja melembaga, maka gereja berdiri dalam struktur



kepemimpinan yang bertingkat, dimana Pucuk Pimpinan menduduki jabatan yang tertinggi. Jabatan pemimpin gereja menurut pandangan Luther dalam sistem pemerintahan Episkopal Sinodal menjabat sebagai pemimpin tertinggi dan satu-satunya, namun tugas dan tanggung jawab pelayanannya dirumuskan oleh Sinode; kekuasaan dan otoritas Pucuk Pimpinan juga dibatasi oleh Sinode. Kedua, pengaruh pengorganisasian kepemimpinan pucuk pimpinan gereja terhadap Gereja HKI dikategorikan “Kurang Baik” sesuai dengan angket yang telah disebar. Hal ini mengindikasikan bahwa kurangnya pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pucuk pimpinan Gereja yang mewarisi pelayanan seorang episkopos akan tugas pengembalaan pelayan lainnya dan warga jemaat dalam kebenaran ajaran dan disiplin gereja sesuai dengan keberadaannya sebagai Penilik Jemaat. Tugas pelayanan keimaman seakan dikesampingkan oleh tugas kepemimpinan lembaga yang membuat kurangnya keterlibatan pucuk pimpinan untuk menanamkan ajaran dan disiplin gereja terhadap gembalaannya.

## Referensi

- Boersema, J.A., dkk. (2015). *Berteologi Abad XXI: Menjadi Kristen Indonesia di Tengah Masyarakat Majemuk*. Jakarta: PT. Suluh Cendekia
- Diester, N.S. (2004). *Teologi Sistematis*. Yogyakarta: Kanisius
- Ismail, A. (2009). *Selamat Bergereja*. Jakarta: BPK Gunung Mulia
- Jacobs, T. (1988). *Gereja Menurut Perjanjian Baru*. Yogyakarta: Kanisius
- Lumbantobing, S.M (2003). *Model Kepemimpinan Episkopal*. Jakarta: BPK Gunung Mulia
- Meliala, S. J., & Tarigan, B. (2016). *Presbiterial Sinodal*. Jakarta: Praninta Aksara
- Munthe, A. (2004). *Panggilan dan Tugas Penatua Gereja*. Medan: (tanpa penerbit)
- Richard M. Daulay, “Gereja dan Kaderisasi Pemimpin” dalam *Kritis Berfikir Santun Berkarya*, (Medan: HKBP Distrik X Medan Aceh, 2007
- Salim, M. (2009). “GMI Sebagai Komunitas Transformatif: Sebuah Upaya Dalam Membentuk Pola Kepemimpinan Yang Berkarakter Kristiani” dalam *Estomihi*, dkk, *Meruntuhkan Untuk Membangun Kembali*. Yogyakarta: Kanisius
- Saragih, J. (1999). *Menyikapi Periodisasi Gereja*. Jakarta: CV. Mulya Sari
- Siagian, R.J. (2014). “Gereja Dan Otoritas”, dalam Raulina Siagian, dkk, *Fellowship Through Stewardship*. Pematang Siantar: L-SAPA
- Simamarmata, B.T. (1996). “Kepemimpinan Gerejawi” dalam *Membangun Tubuh Kristus: Buku Peringatan Jubileum 25 Tahun Kependetaan Dan HUT Ke-50 Pdt. Dr. Robinson Rajagukguk*, MST, M.Th. Pematang Siantar: Yayasan STT HKBP Pematang Siantar
- Simanjuntak, N.M. (2014). “Membangun Persekutuan Yang Sinergis Sesama Pelayan Gerejawi”, dalam Raulina Siagian, dkk, *Fellowship Through Stewardship: 65 Tahun Pdt. Bistok Manalaksak Siagian, S.Th. Pematang Siantar: L-SAPA*
- Simarmata, B.T. (1996). “Kepemimpinan Gerejawi” dalam J.R. Hutauruk, dkk, *Membangun Tubuh Kristus: Buku Peringatan Jubileum 25 Tahun Kependetaan dan HUT ke-50 Pdt. Dr. R. Rajagukguk*. Pematang Siantar: Yayasan STT HKBP,
- Sitompul, A.A. (1980). “Arti Jabatan Dalam Gereja Menurut M. Luther”, dalam R.M.G. Marbun & A. Munthe, *Missio Dei: Kumpulan Karangan Kenang-kenangan Pada Ulang Tahun Ke-60 Dr. A. Lumbantobing*. Pematang Siantar: Kolportase GKPI
- Stott, J. (2012). *Isu-isu Global: Menantang Kepemimpinan Kristiani*, (Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih,
- Tarigan, B (2014). “Kepemimpinan Bercermin Dari Gereja Mula-Mula” dalam *Jurnal Teologi STT Abdi Sabda Medan Edisi XXXII: Juli-Desember*. Medan: STT Abdi Sabda Medan
- Thiessen, H.C. (1993). *Teologi Sistematis*. Malang: Gandum Mas
- Tim Penyusun. (1984). *Memasuki Masa Depan Bersama: Keputusan SR PGI X di Ambon*. Jakarta: BPK Gunung Mulia
- Weber, M. (1978). *Economy and Society*. Berkeley: University of California Press